

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A.Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Achmad, Ali 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad, Syarif, 2019, *Menguatkan Toleransi Antaragama di Pedesaan*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung.
- Ali, H. Zaenuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azwar, Syaifuddin, 2015, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Basah, Sjahran 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- HR, Ridwan, 2006 *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Kusnanto, 2019, *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*, 2019, Alprin, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara, dalam Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Perdailan Tata Usaha Negara*, LPP-HAN, Jakarta.
- Marbun,S.F., 2015, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Masriani, Yulies Tiena, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J., 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Rosyda Karya, Bandung.
- Muchsin, H., 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hadjon, Phillipus 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Lubis, H.M., 2017, *Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan beragama di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Utrecht, E., 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- W.F. Prins dan R Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, 2000, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

## 2. Artikel Jurnal

Deni Miharja dan M. Mulyana, 2019, *Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan di Jawa Barat, Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 3, Vol 2.

Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana, 2019, *Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 4.

Suharyanto, Budi, 2019, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1.

Untoro, 2018, *Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan*, *Jurnal Pandecta*, Volume 13, Nomor 1.

## 3. Hasil Penelitian/ Tugas akhir

Agus Suntoro dkk, 2020, Kajian Komnas HAM RI atas PBM No.9 dan No. 8 tahun 2006, terkait pendirian rumah ibadat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Alfons, Izaac, 2016, *Penyelesaian Konflik Pembangunan Tempat Ibadah, Studi Kasus: Gereja Kristen Indonesia Yasmin-Bogor*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (<http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses pada 31 Maret 2021)

Astuti, Chintia Rizky Nur, 2020, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Problematika Kewenangan Dalam Pendirian Rumah ibadat (Studi Putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN- BDG)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, (<http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada 31 Maret 2021)

Ikhsan, Muhammad, 2019, *Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam*

Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru. Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, Pekanbaru. (<http://repository.uin-suska.ac.id/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2021)

Kementerian Agama RI, *Executive Summary SURVEY INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2019*, [simlitbangdiklat.kemenag.go.id](http://simlitbangdiklat.kemenag.go.id) (Diakses Pada 4 Januari 2021)

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

The Wahid Institute, 2008, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia: Menapaki Bangsa yang Kian Retak*. Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan Tifa.

#### 4. Internet

Adi Briantika, *Jemaat GKI Yasmin & HKBP Filadelfia Ingin Segera Ada IMB Gereja*, <https://tirto.id/eoT5> (Diakses pada 14 November 2020)

Admin, *GKI Yasmin dan Masjid Imam bin Hanbal jadi Sorotan Komnas HAM* <https://www.radarbogor.id/2019/10/01/gki-yasmin-dan-masjid-imam-bin-hanbal-jadi-sorotan-komnas-ham/> (Diakses pada 14 Januari 2021)

Admin, Bima Arya Minta Proses Pembekuan IMB Masjid di Bogor Dipercepat,

<https://regional.kompas.com/read/2017/09/08/14165621/bima-arya-minta-proses-pembekuan-imb-masjid-di-bogor-dipercepat>.

(Diakses Pada 4 Januari 2021)

Admin, *Bima Arya Janjikan Masalah GKI Yasmin Beres Pertengahan 2020*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200216222158-20-475167/bima-arya-janjikan-masalah-gki-yasmin-beres-pertengahan-2020> (Diakses 15 November 2020)

Admin, *“Bekukan IMB Masjid, Pemkot Bogor Kalah di PTUN”* <https://metro.sindonews.com/berita/1291892/170/bekukan-imb-masjid-pemkot-bogor-kalah-di-ptun?showpage=all> (Diakses pada 25 Februari 2021)

Admin, *“Penolakan Rumah ibadat walau sudah ada IMB Mengapa bisa terjadi?”* <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1262781-penolakan-rumah-ibadah-walau-sudah-ada-imb-mengapa-bisa-terjadi>

(Diakses pada tanggal 1 Maret 2021)

Arbi Sumandoyo, *Mereka Kompak Menolak Aliran Wahabi*, <https://tirto.id/mereka-kompak-menolak-aliran-wahabi-cker>

(Diakses pada 14 Januari 2021)

Badan Pusat Statistik, *Statistik Sosial Budaya 2018*, <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/05/153a8fecadb642f5c>

[4cf32e5/statistik-sosial-budaya-2018.html](#) (diakses pada 7 Februari 2021)

Desi Purnamasari, "Problem Umat Agama Minoritas: Susah Mendirikan Rumah ibadat", <https://tirto.id/dJeE> (Diakses 14 November 2020)

Friski Riana & Dewi Nurita, "Rumah ibadat, Belenggu Mayoritas", <https://interaktif.tempo.co/proyek/rumah-ibadah-belenggu-mayoritas/index.html> (Diakses 14 November 2020)

Human Rights Watch, 2013, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. <https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256410> (Diakses pada 14 November 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2021)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2021)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosialisasi> (Diakses pada 31 Agustus 2021)

## 5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E)
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Bogot Tahun 2014 Nomot 39 Seri E)
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E)